

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian pada kali ini dilakukan di kantor BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Blitar. Sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Blitar mempunyai perbedaan dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya dalam rekening belanja tidak langsung yang dikelolanya. Selain Belanja Pegawai sebagaimana Organisasi Perangkat Daerah lainnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar juga mengelola rekening-rekening belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, rekening belanja tidak terduga yang menyebabkan besarnya belanja tidak langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar.

B. Hasil Analisis Penelitian.

1. Analisis Kinerja Keuangan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2015-2018.

a. Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan

Dalam Analisis varians Anggaran pendapatan ini dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Biasanya selisih anggaran sudah diinformasikan dalam laporan realisasi anggaran yang sudah disajikan pemerintah daerah untuk membantu pengguna

laporan dalam memahami dan menganalisis Kinerja Pendapatan.⁷⁴ Berikut ini tabel 4.1 perhitungan varians pendapatan daerah Kabupaten Blitar tahun 2015-2018.

Tabel 4.1
Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan Kabupaten Blitar
Tahun 2015-2018

TH.	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Varian/Selisih (Rp)	Persentase (%)
2015	2,128,900,140,657.66	2,121,588,164,366.99	7,311,976,290.67	99.66
2016	2,305,383,873,219.08	2,240,251,740,265.22	65,132,132,953.86	97.17
2017	2,341,415,865,134.00	2,307,812,881,171.35	33,602,983,962.65	98.56
2018	2,361,756,636,564.51	2,352,130,150,237.09	9,626,486,327.42	99.59
	Rata-rata		28,918,394,883.65	98.75

Sumber: Data yang diolah oleh peneliti

Berdasarkan tabel perhitungan diatas, dari keempat periode yang diteliti dilihat dari Varians Anggaran Pendapatan Kabupaten Blitar pada tahun 2015-2018 secara keseluruhan memiliki rata-rata 98.75% atau sebesar Rp 28,918,394,883.65 dapat dikatakan kurang baik karena pemerintah daerah tidak mampu mencapai anggaran atau target pendapatan yang telah ditetapkan. Pemerintah Daerah dikatan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang di anggarkan.⁷⁵

b. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode bersangkutan, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan

⁷⁴ Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...*,hal.136

⁷⁵ Ibid.

pendapatan secara positif atau negatif. Kinerja Anggaran di nilai positif apabila Pertumbuhan Pendapatan positif dan kecenderungan meningkat, sebaliknya jika terjadi pertumbuhan pendapatan negatif maka hal itu menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan.⁷⁶ Berikut tabel 4.2 Analisis Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Blitar tahun 2015-2018.

Tabel 4.2
Analisis Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Blitar
Tahun 2015 – 2018.

Tahun	Total Pendapan Daerah (Rp)	Pertumbuhan (%)
2014	1,927,712,093,449.89	
2015	2,121,588,164,366.99	10.10
2016	2,240,251,740,265.22	5.60
2017	2,307,812,881,171.35	3.02
2018	2,352,130,150,237.09	1.90

Sumber: Data yang diolah oleh peneliti

Berdasarkan tabel 4.2 diatas mengenai pertumbuhan pendapatan dapat dilihat pertumbuhan pendapatan pada Kabupaten Blitar tahun anggaran 2015 sampai dengan 2018 pertumbuhannya positif. Dapat di lihat pada tahun 2015 persentase pertumbuhannya sebesar 10.10% dan presentase pertumbuhan menurun menjadi 5.60% di tahun 2016. Pada tahun 2017 persentase menurun menjadi 3.02 dan di tahun 2018 persentase pertumbuhan pendapatan menurun lagi menjadi 1.90%.

⁷⁶ Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...*, Hal. 137

c. Analisis Rasio Keuangan

1) Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah.⁷⁷ Berikut Tabel 4.3 Perhitungan Derajat Desentralisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

Tabel 4.3
Analisis Derajat Desentralisasi Kabupaten Blitar
Tahun 2015 – 2018

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapan Daerah (Rp)	Rasio (%)	Kinerja
2015	216,648,256,569.99	2,121,588,164,366.99	10.21	Sedang
2016	224,106,765,168.87	2,240,251,740,265.22	10.00	Sangat Kurang
2017	322,878,943,149.35	2,307,812,881,171.35	13.99	Kurang
2018	252,453,245,801.27	2,352,130,150,237.09	10.73	Kurang
	Rata-rata		11.23	Kurang

Sumber: Data yang diolah oleh peneliti.

Pada tabel 4.3 perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi, Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.⁷⁸ Pada tahun 2015 derajat desentralisasi pada Kabupaten Blitar sebesar 10.21%. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 0.21% menjadi 10% dan peningkatan sebesar 3.99% menjadi 13.99% pada tahun 2017. Tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan lagi sebesar 3.26% menjadi 10.73%. Secara

⁷⁷ Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...*, hal.140

⁷⁸ Ibid. hal.140

keseluruhan derajat desentralisasi daerah Kabupaten Blitar memiliki rata-rata sebesar 11.23%, yang artinya kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan masih dinilai kurang baik.

2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.

Rasio ketergantungan keuangan dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima dengan total pendapatan daerah.⁷⁹

Berikut tabel 4.4 perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah.

Tabel 4.4
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar
Tahun 2015 – 2018.

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio (%)	Ketergantungan Keuangan Daerah
2015	1,894,818,020,797.00	2,121,588,164,366.99	89.31	Sangat tinggi
2016	1,997,501,233,376.00	2,240,251,740,265.22	89.16	Sangat tinggi
2017	1,984,933,938,022.00	2,307,812,881,171.35	86.01	Sangat tinggi
2018	2,014,497,020,105.00	2,352,130,150,237.09	85.65	Sangat tinggi
	Rata-rata		87.53	Sangat tinggi

Sumber: Data yang diolah oleh peneliti

Pada tabel 4.4 penghitungan Rasio ketergantungan keuangan daerah pada tahun 2015-2018 mengalami penurunan tiap tahunnya. Dari 89.31% di tahun 2015 menurun menjadi 89.16% di tahun 2016, di tahun berikutnya menurun lagi sebesar 3.15% menjadi 86.01% pada tahun 2017. Kemudian mengalami penurunan lagi di tahun 2018 menjadi 85.65%.

Dalam perhitungan tabel 4.4 bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah selama empat tahun terakhir yaitu mencapai rata-rata 87.53%. Hal ini

⁷⁹ Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: YKPN. 2016, hal.140

menunjukkan Pendapatan Asli Daerah mempunyai ketergantungan terhadap pemerintah pusat sangat tinggi dan pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Blitar masih rendah.

3) Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian keuangan dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman.⁸⁰

Berikut tabel 4.5 perhitungan Rasio Kemandirian Daerah.

Tabel 4.5
Rasio Kemandirian Daerah di Kabupaten Blitar
Tahun 2015 – 2018.

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio (%)	Kemampuan Keuangan
2015	216,648,256,569.99	1,894,818,020,797.00	11.43	Rendah sekali
2016	224,106,765,168.87	1,997,501,233,376.00	11.22	Rendah sekali
2017	322,878,943,149.35	1,984,933,938,022.00	16.27	Rendah sekali
2018	252,453,245,801.27	2,014,497,020,105.00	12.53	Rendah sekali
	Rata-rata		12.86	Rendah sekali

Sumber: Data yang diolah oleh peneliti

Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya dan ketergantungan terhadap bantuan eksternal terutama pemerintah pusat/provinsi rendah,⁸¹ Di lihat pada tabel 4.5 Rasio kemandirian tahun 2015-2018 Rendah sekali, yaitu pada tahun 2015 sebesar 11.43% ditahun 2016 mengalami penurunan

⁸⁰ Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...*, hal.140.

⁸¹ Ibid. hal.140.

menjadi 11.22% dan pada tahun 2017 naik menjadi 16.27% sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan lagi sebesar 3.74% menjadi 12.53%.

Berdasarkan uraian dan perhitungan tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian selama empat tahun terakhir tingkat kemandiriannya masih rendah sekali yaitu dengan rata-rata rasio sebesar 12.86%. Hal ini menunjukkan rasio kemandirian yang masih rendah mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Blitar dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada penerimaan dari pemerintah pusat. Untuk itu pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatan yang telah ada. Pemerintah daerah harus mencari alternatif lain yang dapat mengatasi kekurangan dalam pembiayaan. Seperti halnya melakukan kerja sama dengan pihak swasta dan unit keuangan berbasis syariah.

4) Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah.

Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD. Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan.⁸² Berikut tabel 4.6 rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.

⁸² Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: YKPN. 2016, hal.141.

Tabel 4.6
Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah di Kabupaten Blitar
Tahun 2015 – 2018

Tahun	Anggaran PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Presentase (%)	Kinerja
2015	194,741,380,463.66	216,648,256,569.99	111.25	Sangat Efektif
2016	214,186,478,670.78	224,106,765,168.87	104.63	Sangat Efektif
2017	314,340,556,529.00	322,878,943,149.35	102.72	Sangat Efektif
2018	233,971,892,347.51	252,453,245,801.27	107.90	Sangat Efektif
	Rata-rata		106.63	Sangat Efektif

Sumber: Data yang diolah oleh peneliti.

Pada tabel 4.6 diatas mengenai efektivitas pendapatan asli daerah dapat dilihat efektivitas pendapatan asli daerah di Kabupaten Blitar tahun anggaran 2015 sampai dengan 2018 kinerjanya sangat efektif. Pada Tahun 2015 rasio efektivitasnya sebesar 111.25%. Kemudian pada Tahun 2016 sebesar 104.63%. Untuk rasio efektivitas tahun 2017 sebesar 102.72% dan pada tahun 2018 sebesar 107.90%. Rasio efektivitas PAD memiliki rata-rata 106.63%, yang artinya kemampuan daerah dalam menjalankan tugas bisa dikatakan sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memonilisasi penerimaan PAD sesuai yang telah dianggarkan.

2. Analisis Kinerja Keuangan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2015-2018.

a. Analisis Varians Belanja

Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Dalam hal ini pemerintah daerah akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanja tidak

melebihi dari yang dianggarkan.⁸³ Berikut tabel 4.7 perhitungan varians belanja di Kabupaten Blitar pada tahun 2015-2018.

Tabel 4.7
Analisis Varians Belanja Kabupaten Blitar
Tahun 2015-2018.

TH.	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Varians/Selisish (Rp)	(%)
2015	2,170,898,831,112.66	1,881,098,064,441.98	289,800,766,670.68	86.65
2016	2,296,177,700,619.86	2,097,609,970,823.00	198,567,729,796.86	91.35
2017	2,169,793,566,086.88	2,041,744,040,905.56	128,049,525,181.32	94.10
2018	2,158,880,996,325.18	1,912,107,104,079.77	246,773,892,245.41	88.57
	Rata-rata		215,797,978,473.57	90.17

Sumber: Data yang diolah oleh peneliti.

Berdasarkan tabel perhitungan diatas, dari keempat periode yang diteliti dilihat dari Varians Anggaran Belanja Kabupaten Blitar pada tahun 2015-2018 dikatakan baik karena realisasi belanjanya tidak melebihi dari yang dianggarkan. Pada tahun 2015 varians belanja sebesar 86.65% dan mengalami penurunan kinerja belanja pada tahun 2016 yaitu varians belanja menjadi 91.35%. pada tahun 2017 varians belanja mencapai 94.10% yang artinya kinerja belanja semakin menurun lagi, tetapi pada tahun berikutnya di tahun 2018 mengalami kenaikan kinerja belanja sebesar 5.53% yaitu dengan varians belanja sebesar 88.57%.

⁸³ Mahmudi. Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ...*, hal.155

b. Analisis Keserasian Belanja

1) Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah.⁸⁴ Berikut tabel 4.8 perhitungan analisis belanja operasi terhadap total belanja di Kabupaten Blitar Tahun 2015-2018.

Tabel 4.8
Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Kabupaten Blitar
Tahun 2015-2018

Tahun	Realisasi Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Operasi (%)
2015	1,372,766,113,662.19	1,881,098,064,441.98	72.98
2016	1,404,776,209,066.00	2,097,609,970,823.00	66.97
2017	1,447,518,137,454.06	2,041,744,040,905.56	70.90
2018	1,502,332,438,026.36	1,912,107,104,079.77	78.57
	Rata-rata		72.36

Sumber: Data yang diolah oleh peneliti.

Berdasarkan tabel perhitungan diatas, pada tahun 2015 rasio belanja operasi mencapai nilai 72.98% dan mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 6.01% menjadi 66.97%. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 3.93% menjadi 70.90%. Kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan lagi sebesar 7.67% menjadi 78.577%. Dalam jangka waktu empat tahun terakhir pengalokasian rata-rata untuk belanja operasi sebesar 72.36% dari total belanja dan digunakan untuk belanja operasi

⁸⁴ Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...*, hal.162

(belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial).

2) Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Belanja modal ini akan mempengaruhi neraca pemerintah daerah, yaitu menambah aset daerah. Pemerintah daerah yang memiliki pendapatan rendah berorientasi untuk giat melakukan belanja modal sebagai bagian investasi modal jangka panjang, sedangkan pemerintah daerah yang pendapatannya tinggi biasanya telah memiliki aset modal yang mencukupi.⁸⁵ Berikut tabel 4.9 perhitungan analisis belanja modal terhadap total belanja pada Kabupaten Blitar pada tahun 2015-2018.

Tabel 4.9
Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja Kabupaten Blitar
Tahun 2015-2018.

Tahun	Realisasi Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Modal (%)
2015	508,331,950,779.79	1,881,098,064,441.98	27.02
2016	692,718,770,257.00	2,097,609,970,823.00	33.02
2017	593,444,438,951.50	2,041,744,040,905.56	29.07
2018	409,773,750,053.41	1,912,107,104,079.77	21.43

Sumber: Data yang diolah oleh peneliti.

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 rasio belanja modal terhadap total belanja sebesar 27.02%. Kemudian pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 6% menjadi 33.02%. Pada tahun 2017

⁸⁵ Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...*, hal.163.

mengalami kenaikan lagi sebesar 3.95% menjadi 29.07% dan pada tahun 2018 mengalami penurunan drastis yaitu sebesar 7.64% menjadi 21.43%. Dalam jangka waktu empat tahun terakhir pengalokasian rata-rata untuk belanja modal sebesar 27.64%, yang artinya dari total belanja daerah untuk belanja modal (belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset lainnya dan belanja aset lainnya).

c. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antar realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, begitu sebaliknya apabila lebih dari 100% maka telah diidentifikasi telah melakukan pemborosan anggaran.⁸⁶ Berikut tabel 4.10 perhitungan rasio efisiensi belanja pada Kabupaten Blitar Tahun 2015-2018.

⁸⁶ Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...*, hal.164.

Tabel 10
Rasio Efisiensi Belanja Kabupaten Blitar
Tahun 2015-2018

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Rasio Efisiensi Belanja (%)	Kinerja
2015	2,170,898,831,112.66	1,881,098,064,441.98	86.65	Efisien
2016	2,296,177,700,619.86	2,097,609,970,823.00	91.35	Efisien
2017	2,169,793,566,086.88	2,041,744,040,905.56	94.10	Efisien
2018	2,158,880,996,325.18	1,912,107,104,079.77	88.57	Efisien
	Rata-rata		90.17	Efisien

Sumber: Data yang diolah oleh peneliti.

Tabel perhitungan diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 rasio efisiensi sebesar 86.65%, kemudian pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 4,7% menjadi 91,35%. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan lagi sebesar 2.75% yaitu menjadi 94.10% dan pada tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat besar yaitu mencapai 5.53% dan menjadi 88.57%. Secara keseluruhan jika dilihat rata-rata persentase rasio efisiensi belanja daerah dari tahun 2015-2018 pemerintah daerah Kabupaten Blitar sebesar 90.17% yang artinya kinerja pemerintah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran atau tidak terjadi pemborosan anggaran karena nilai efisiensi belanjanya kurang dari 100%.